

## Performance Evaluation Of Daily Government MSME Development Programs Case Study: "Uthman Savings" Bukittinggi City Government

### Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan UMKM Pemerintah Daerah Studi Kasus: "Tabungan Utsman" Pemerintah Kota Bukittinggi

Mutia Purwayanti<sup>1\*</sup>, Vima Tista Putriana<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Padang<sup>1,2</sup>

[mutiapurwayanti@gmail.com](mailto:mutiapurwayanti@gmail.com)<sup>1</sup>

\*Corresponding Author

#### ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a strategic role and potential and have an important position in economic development but have constraints such as limited capital. On the basis of the high level of MSMEs' need for capital, the City of Bukittinggi issued the Uthman Savings program. Through the Uthman Savings, apart from saving, the community can receive loans in advance, and all costs incurred as a result of the loan will be borne by the City Government through the Regional Income and Expenditure Budget (APBD). As long as this program is running, it is found that there are several obstacles such as debtors who complain about the loan limit of only up to 10 million, the difficulty of verifying registration because the conditions are not met making it difficult to get benefits from Uthman's savings, there is a savings deposit system every day, and loan contracts in initial which is only intended as business capital while many customers need it more for other purposes. The purpose of this study is to find out and understand the performance of the MSME empowerment program in the city of Bukittinggi through the Uthman Savings which will then be evaluated using the Logic model method. This research method is qualitative with data collection techniques, namely observation, interviews and document analysis. The informants in this study were the Mayor of Bukittinggi, the Director of the BPRS Jam Gadang Bukittinggi, the UKM Service, the Sharia Supervisory Board and Uthman Savings Customers. The data analysis procedure in this study used thematic analysis. The results of the input evaluation in this program are categorized as very good, because all the components needed to run the program are met. At the activity evaluation stage, it is in a fairly good category because there are still a number of obstacles, starting from the design of the Perwako to program supervision by the DPS. The results of the output evaluation are in the very good category because many parties benefit from both the customer and the management side. Outcomes cannot be seen yet because the program still needs time to be able to see its long-term impact. Suggestions for further research are to increase the number of informants for Utsman savings customers so that they can get more varied information.

**Keywords:** Performance Evaluation, MSME Empowerment, Uthman's Savings

#### ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan potensi yang strategis dan memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi namun memiliki kendala seperti keterbatasan modal. Atas dasar tingginya tingkat kebutuhan UMKM terhadap permodalan, Pemerintah Kota Bukittinggi mengeluarkan program Tabungan Utsman. Melalui Tabungan Utsman, selain menabung, masyarakat dapat menerima pinjaman terlebih dahulu, dan seluruh biaya yang timbul akibat pinjaman tersebut akan ditanggung oleh Pemerintah Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama program ini berjalan, ditemukan beberapa kendala seperti debitur yang mengeluhkan batas pinjaman yang hanya sampai 10 juta, sulitnya verifikasi pendaftaran karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga sulit untuk mendapatkan manfaat dari tabungan Utsman, adanya sistem penyeteroran tabungan setiap hari, dan akad pinjaman di awal yang hanya diperuntukkan sebagai modal usaha sedangkan banyak nasabah yang lebih membutuhkan untuk keperluan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kinerja program pemberdayaan UMKM di kota Bukittinggi melalui Tabungan Utsman yang kemudian akan dievaluasi dengan menggunakan metode Logic model. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan analisis

dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Walikota Bukittinggi, Direktur BPRS Jam Gadang Bukittinggi, Dinas UKM, Dewan Pengawas Syariah dan Nasabah Tabungan Utsman. Prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik. Hasil evaluasi input pada program ini dikategorikan sangat baik, karena semua komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan program terpenuhi. Pada tahap evaluasi aktivitas berada pada kategori cukup baik karena masih terdapat beberapa kendala, mulai dari perancangan Perwako hingga pengawasan program oleh DPS. Hasil evaluasi output berada pada kategori sangat baik karena banyak pihak yang diuntungkan baik dari sisi nasabah maupun dari sisi manajemen. Outcome belum dapat dilihat karena program masih membutuhkan waktu untuk dapat melihat dampak jangka panjangnya. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambah jumlah informan untuk nasabah tabungan Utsman sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih bervariasi.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kinerja, Pemberdayaan UMKM, Tabungan Utsman

## 1. Pendahuluan

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014 mengenai otonomi daerah, visi pemerintah daerah dalam era desentralisasi adalah berusaha menciptakan iklim yang memungkinkan bagi rakyat untuk berusaha dan membangun dirinya secara otonom agar tercipta kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki perekonomian daerah. UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab mengatur dan menjaga kesejahteraan social (Anggleni, 2018).

Kehidupan yang sejahtera menjadi dambaan setiap orang untuk memenuhi hasrat ekonominya berupa segala kebutuhan baik sandang, pangan dan papan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Upaya yang dilakukan agar tujuan tercapai masyarakat akan terus berusaha melakukan berbagai usaha. Upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM mampu bertahan dalam situasi apapun untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ketangguhan UMKM terbukti saat terjadi krisis moneter tahun 1998 banyak usaha-usaha besar yang berjatuh namun UMKM tetap bertahan dan bahkan bertambah jumlahnya (Srijani, 2020).

Pemerintah kota Bukittinggi membuat suatu program untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan dasar tingginya tingkat kebutuhan UMKM terhadap modal. Melalui kerjasama pemerintah Kota Bukittinggi dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Bukittinggi selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu dengan mengeluarkan Tabungan Utsman. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Perwako No 7 tahun 2022 tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi. Melalui Tabungan Utsman selain menabung masyarakat bisa menerima pinjaman di muka dengan akad pinjaman syariah yaitu akad Murabahah. Dengan akad Murabahah maka tidak ada riba di dalamnya, dan masyarakat dapat menabung untuk pembayaran cicilan pokoknya setiap harinya.

Dalam Perwako No 7 Tahun 2022 Pasal 12 menjelaskan tentang seluruh biaya yang timbul akibat pinjaman yang dilakukan masyarakat melalui Tabungan Utsman ditanggung Pemerintah kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Khusus untuk bagian permodalan UMKM, nasabah hanya akan membayar sesuai dengan harga pokok pembiayaan atau nilai objek Murabahah yang diberikan oleh PT BPRS Jam Gadang Syariah tanpa dikenakan biaya apapun, artinya sistem pembiayaan tabungan Utsman Bukittinggi dilakukan tanpa adanya biaya tambahan seperti biaya agunan, biaya margin, dan biaya administrasi. Nantinya ketiga biaya di atas akan dibiayai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui APBD Kota Bukittinggi. Jika seandainya ada uang nasabah yang berlebih ketika membayar angsuran maka akan langsung masuk ke tabungan Nasabah. Tabungan Utsman ini

akan menjadi program unggulan kota Bukittinggi dengan bukti Bukittinggi adalah kota yang pro dengan ekonomi masyarakat.

Terbukti melalui Tabungan Utsman ini Bukittinggi mendapatkan tiga penghargaan sekaligus dari TOP BUMD Awards 2023 yaitu Walikota Bukittinggi Erman Safar menerima penghargaan kategori Top Pembina BUMD 2023, BPRS Jam Gadang meraih TOP BUMD Awards 2023 bintang 5, dan Direktur Utama BPRS Jam Gadang Feri Irawan meraih TOP CEO BUMD 2023 (Pratiwi, 2023). Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) bapak Gusrizal Gazahar menyampaikan bahwa selama tahun 2022 pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap BPRS untuk memastikan terpenuhinya prinsip kepatuhan Syari'ah. Syariah *Compliance* (kepatuhan) dalam operasional BPRS, DPS secara intens dan berkesinambungan berkomitmen untuk senantiasa memberikan saran dan nasihat kepada manajemen agar senantiasa mematuhi prinsip dan nilai syariah serta tata kelola perusahaan yang baik dalam mengelola usaha (Alamsyah, 2023).

Syarat umum untuk bisa mendapatkan manfaat dari Tabungan Utsman ini yaitu Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun, memiliki identitas yang sah seperti KTP atau SIM Bukittinggi, setoran awal berjumlah Rp. 10.000, tidak memiliki riwayat kredit macet atau catatan buruk di bank lain, rincian kegunaan pinjaman, lokasi usaha harus di Bukittinggi, dan menandatangani perjanjian pembukuan rekening Tabungan Utsman (Yursil, 2022). Selanjutnya peneliti mengunjungi Pasar Bawah Bukittinggi dengan mewawancarai 10 nasabah yang telah memanfaatkan Tabungan Utsman ada beberapa kendala yang ditemukan terkait kinerja program pemberdayaan UMKM melalui Tabungan Utsman ini, peneliti menemukan adanya nasabah yang kesulitan dalam verifikasi pendaftaran karena salah satu syarat untuk mendaftar yaitu harus sudah memiliki usaha dan ini tidak sesuai dengan bagaimana kinerja program pemberdayaan UMKM seharusnya memiliki kesesuaian program dengan kebutuhan UMKM, jika program pemberdayaan UMKM tidak memperhitungkan kebutuhan UMKM secara tepat, program tersebut mungkin tidak memberikan manfaat yang signifikan (Saleh, 2018).

Peneliti juga menemukan keluhan nasabah terkait batas jumlah pinjaman hanya 10 juta untuk sekali pinjaman, ini juga sebenarnya tidak sesuai dengan bagaimana kinerja program pemberdayaan UMKM yang seharusnya yang tidak memiliki keterbatasan akses ke sumber daya, dan sumber daya yang dimaksud disini adalah modal jika program pemberdayaan UMKM tidak mampu menyediakan akses yang memadai ke sumber daya ini, UMKM mungkin tetap mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan memperluas usahanya.

Sejauh ini program tabungan Utsman belum dilakukan evaluasi terhadap kinerja program nya karena program ini masih tergolong program yang masih baru. Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasi atau mengimplementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Evaluasi sama artinya dengan kegiatan supervisi. Kegiatan evaluasi/supervisi dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan. Manfaat dari evaluasi program dapat berupa penghentian program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarluaskan program (Rosyidi, 2022).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau cara penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat

deskriptif dan non-numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini fokus pada pemahaman dan interpretasi mendalam tentang fenomena yang diteliti dari sudut pandang yang subjektif. Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kinerja program pemberdayaan UMKM di Kota Bukittinggi melalui Tabungan Utsman, maka pendekatan kualitatif dipandang cocok untuk diterapkan pada penelitian ini karena akan menganalisa secara mendalam program dan mengidentifikasi komponen-komponen yang ada dengan menggunakan *logic model*.

Dalam penelitian ini melibatkan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Teknik tersebut dirasa tepat untuk digunakan dalam penelitian ini untuk dapat menjawab pertanyaan “bagaimana kinerja program pemberdayaan UMKM di Kota Bukittinggi melalui Tabungan Utsman , jika dievaluasi dengan metode *logic model*” dengan mendapatkan hasil analisis yang mendalam sehingga mampu menjelaskan realita yang terjadi pada fenomena.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur dan *in-depth interview* dengan durasi waktu masing-masing informan adalah 30-60 menit menggunakan perekam suara handphone. Digunakannya teknik wawancara ini agar bisa mendapatkan informasi mengenai fenomena yang diteliti secara lebih mendetail dengan pihak yang memang langsung terlibat. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 21-31 Juli 2023 dengan jumlah informan keseluruhan 14 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah *thematic analysis*, karena termasuk metode yang mudah dipahami dan diaplikasikan, dimana peneliti mendefinisikan tema-tema utama yang ditemukan dari pertanyaan penelitian dan sub tema yang muncul dari data.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Pentingnya untuk mengevaluasi program pemberdayaan UMKM melalui Tabungan Utsman dikarenakan berdasarkan survey awal peneliti seperti telah disebutkan di bab 1 ditemukan adanya masalah seperti keterbatasan alokasi anggaran untuk proses pemberdayaan UMKM, tidak adanya pemahaman dan keterampilan dari UMKM itu sendiri, sulitnya verifikasi pendaftaran, dan batasan jumlah pinjaman. Sejauh ini program Tabungan Utsman masih di dalam proses perkembangan dan juga perbaikan program karena program ini masih tergolong masih baru. Evaluasi program adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan guna pengambilan sebuah keputusan.

#### Latar Belakang Kasus

Bukittinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di provinsi Sumatra Barat, dengan luas wilayah sebesar 25,24 km<sup>2</sup>, yang menjadikan Bukittinggi sebagai salah satu kota dengan wilayah tersempit di Indonesia. Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatra. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Saat ini Bukittinggi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatra Barat, dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah angkatan kerja sebanyak 52.631 orang dan sekitar 3.845 orang di antaranya merupakan pengangguran (Wikipedia, 2023).

Kota Bukittinggi dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian masyarakat membuat upaya dan strategi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja contohnya bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM. Modal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan usaha. Dengan modal yang tinggi akan diikuti dengan kemampuan memproduksi hasil usaha yang lebih banyak, sehingga akan meningkatkan pendapatan. Dengan dasar tingginya tingkat kebutuhan UMKM terhadap

modal melalui kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Bukittinggi selaku BUMD mengeluarkan Tabungan Utsman.

### **Hasil**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh beberapa point penting dalam mengevaluasi kinerja program pemberdayaan UMKM melalui tabungan Utsman, sebagai berikut

### **Motivasi Program**

Dalam pembuatan suatu program tentu ada motivasi yang mendorong langkah-langkah dalam mencapai tujuan program tersebut. Motivasi utama dalam pembuatan program tabungan utsman tergambar pada kutipan wawancara dengan informan P14 pada tanggal 30 Juli 2023 bahwa pemerintah kota ingin membantu pelaku UMKM dalam menghadapi masalah permodalan, menjauhkan pelaku UMKM dari rentenir, dan tentunya ingin mensejahterakan rakyat. Keunikan dari sistem pinjaman yang diberikan pemerintah kota ini yaitu pembiayaan dilakukan secara syariah dan margin bagi hasil ditanggung oleh APBD kota Bukittinggi.

### **Mekanisme Program**

Setelah motivasi suatu program sudah ditentukan maka tahap selanjutnya adalah menjalankan program. Mekanisme program merujuk pada cara dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola suatu program dengan sukses. Dalam proses perancangan program tabungan utsman, dalam wawancara dengan informan (P14) 30 Juli 2023 menginformasikan bahwa proses perancangan program tabungan utsman ini terletak di pemerintah dan bekerjasama dengan BPRS. Pemerintah memastikan dulu APBD, setelah itu menyiapkan regulasinya, aturannya, caranya, siapa yang bisa mendapatkannya, bagaimana teknis penyalurannya, bagaimana pertanggung jawabannya, bagaimana pemerintah harus mengatur pendistribusian subsidiya, yang akhirnya diajukan ke provinsi untuk dievaluasi dan disetujui dalam bentuk Perwako dan baru direalisasikan. Pelaksanaan program tabungan utsman dimulai dengan proses pendaftaran oleh nasabah di BPRS Jam Gadang. Darimana nasabah mendapatkan informasi mengenai tabungan utsman dan dimana informan mendaftar digambarkan oleh informan P1 wawancara 23 Juli 2023 *“Disaat walikota launching di pasar bawah, dan mendaftar langsung ke BPRS”*.

Proses pendaftaran nasabah adalah langkah awal yang penting dalam membuka hubungan antara nasabah dengan BPRS Jam Gadang. Selama proses pendaftaran, nasabah harus memberikan informasi yang akurat dan benar, serta mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku seperti KTP Bukittinggi, lokasi usaha di Bukittinggi, dan memberikan rincian belanja. BPRS akan memastikan kelayakan usaha dengan melakukan survey langsung ke lokasi usaha. Setelah nasabah terverifikasi maka pembiayaan bisa dilakukan. Proses kinerja program melibatkan serangkaian langkah untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Pemerintah kota sebagai fasilitator pemberian margin atas pembiayaan mempunyai prosedur dalam pencairan anggarannya seperti yang diinformasikan oleh P12 bahwa total pembiayaan yang sudah BPRS berikan kepada pelaku UMKM akan dilaporkan ke Bidang Keuangan Dinas UMKM, nanti ada dokumen penagihan dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan standar dari Dinas UKM.

Margin yang diberikan pemerintah kota untuk BPRS sebesar 19% dari total realisasi pembiayaan yang sudah diberikan dan pembayarannya paling lambat 14 hari setelah surat tagihan masuk, setelah itu Bidang Keuangan akan transfer ke BPRS nya. Konsep pembiayaan yang dilakukan menggunakan prinsip syariah dengan akad murabahah, maka perlu ada pengawasan kepatuhan syariahnya. Proses pengawasan program merupakan langkah-langkah

yang diambil untuk memantau dan mengevaluasi kinerja suatu program secara sistematis sesuai dengan pernyataan informan P13 wawancara tanggal 29 Juli 2023

*“Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah membimbing dan mengarahkan pihak manajemen dari awal untuk memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dikonversi kemudian termasuk juga produk-produk dan kegiatan bank yang dulunya konvensional untuk dikonversi. Sudah terpenuhinya persyaratan itu maka keluarlah izin syariahnya dari OJK. Untuk akad yang digunakan sangat kita perhatikan jangan sampai memberi pembiayaan murabahah ke nasabah tetapi objeknya adalah uang. Itu akan beresiko secara syariah tentu dia tidak sesuai karena uang bukan komoditi. Dengan adanya subsidi margin DPS sampai mengawasi ke bentuk perjanjian kerjasama antara bank dengan pemda. BPRS masih dalam proses pertumbuhan dan perbaikan, karna faktor-faktor pendukung dalam perbankan syariah itu belum tercukupi.”* (P13).

Tujuan dari pengawasan program adalah untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam memahami sejauh mana program mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan maka perlu dilakukan langkah penting yaitu menilai kinerja program. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap berbagai aspek kinerja program seperti yang digambarkan informan P8 wawancara 25 Juli 2023 bahwa evaluasi dilakukan di 3 sisi yaitu dari dinas UKM, BPRS dan di dinas perekonomian SekdaKo. Evaluasi internal yang dilakukan BPRS dilakukan sekali seminggu biasanya hari senin pagi, untuk evaluasi tugasnya dilakukan setiap hari. Evaluasi juga dilakukan ke nasabah dengan memberikan kusioner.

### **Kendala Program**

Program dapat menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya dan hasil yang dicapai. Kendala dimulai dari persiapan perancangan program diinformasikan dari informan P9 wawancara 24 Juli 2023 bahwa kendala dalam merancang program tabungan utsman di dinas UKM sedikit tertunda perihal harmonisasi perwako yang bolak balik yang mengakibatkan *launching* program ini tertunda yang awalnya akan diluncurkan awal tahun menjadi bulan Maret 2022. Proses pendaftaran memiliki kendala dalam syarat pendaftaran seperti pernyataan informan (P7) wawancara 23 Juli 2023 *“sebagai pemula tentu belum mempunyai usaha, sedangkan persyaratannya harus ada lokasi usaha dan memiliki rincian biaya untuk usaha”* (P7). Program pemberdayaan UMKM melalui tabungan utsman memang diperuntukan untuk pelaku UMKM yang sudah memiliki usaha, karena salah satu persyaratannya harus sudah memiliki lokasi usaha dan rincian biaya yang akan dipergunakan untuk berdagang.

Kendala yang dapat mempengaruhi kemajuan dan hasil yang diharapkan terjadi pada pelaksanaan program. Sesuai dengan informasi yang disampaikan informan P8 wawancara tanggal 25 Juli 2023 bahwa kendala sistem anggaran di pemerintah kota tidak bisa langsung dieksekusi saat direncanakan, artinya disaat anggaran sudah ada baru bisa dieksekusi, karena program pemerintah tidak hanya tabungan utsman saja jadi harus menunggu untuk eksekusi anggarannya.

Kendala dalam penganggaran dana juga disampaikan oleh informan P12 wawancara 24 Juli 2023 *“Kendala tergantung kondisi keuangan kota tergantung juga dengan pendapatan daerah, semua sesuai kondisi APBD Kota”* (P12). Kendala penganggaran dana dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program, karena itu kondisi dari APBD menjadi faktor penting dalam program tabungan utsman.

Pengembalian pinjaman adalah aspek kritis dalam aktivitas pemberian pinjaman, baik untuk lembaga keuangan maupun individu. Kendala dalam pengembalian pinjaman dapat

memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan dan keberhasilan program peminjaman, diinformasikan melalui informan P8 wawancara 25 Juli 2023 bahwa kendala yang dihadapi karakter nasabah, karena setiap nasabah mempunyai pribadi yang berbeda, ada yang tau dengan kewajibannya dan ada yang lalai sehingga terkadang tidak tepat waktu dalam melakukan pengembalian pinjaman.

### **Hasil Program**

Hasil kinerja program mengacu pada respon, pencapaian tujuan, dampak, dan hasil yang dihasilkan dari pelaksanaan program. Respon menyambut program merujuk pada reaksi dan tanggapan awal dari peserta program dan pemangku kepentingan lainnya terhadap peluncuran suatu program. Tanggapan ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat minat, dukungan, dan potensi keberhasilan program tersebut. Sikap/respon nasabah atas program ini digambarkan melalui informan P1 wawancara 23 Juli 2023 bahwa nasabah menilai baik, bagus, banyak membantu dan meningkatkan ekonomi karena ketika modal naik informan bisa menggunakan dana pinjaman tersebut yang aturannya berhutang tidak jadi berhutang.

Dampak program merujuk pada perubahan yang signifikan dan berkelanjutan yang dihasilkan oleh pelaksanaan suatu program. Dampak mencerminkan hasil konkret dan perubahan nyata yang terjadi dalam BPRS *"Peningkatan pendapat bagi BPRS, disamping marginnya yang cukup besar, pekerjaannya cukup berat karena harus lembur setiap"* (P8). Salah satu cara verifikasi persyaratan penerima manfaat tabungan utsman yaitu petugas BPRS akan melakukan survey kelokasi usaha dan itu memerlukan waktu yang lama sehingga menyebabkan petugas BPRS harus lembur setiap hari. Tetapi dengan terus meningkatnya jumlah nasabah tabungan utsman pendapatan bagi BPRS juga meningkat karena margin yang ditawarkan pemerintah cukup besar yaitu 19% dari realisasi anggaran.

Program tabungan utsman memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat atau yang menjadi sasaran program tersebut, diinformasikan melalui informan (P1) wawancara 23 Juli 2023 bahwa manfaat yang nasabah rasakan dapat menambah penghasilan, dapat membantu keperluan lain, bisa menabung, membantu modal jualan, tidak ada jaminan, pemerintah kota yang membayar marginnya, membayar sambil menabung dan sistem pembayarannya dijemput setiap hari oleh petugas BPRS. Salah satu tujuan utama pembentukan program ini adalah ingin memberantas rentenir, maka pemerintah kota mengadopsi cara rentenir dalam bertransaksi seperti tidak ada jaminan, dan pembayaran dijemput setiap hari. Kelebihannya margin dibayar oleh pemerintah kota, harapannya akan membuat nasabah berfikir untuk meminjam kembali ke rentenir.

Target yang ingin dicapai dalam program tabungan utsman merupakan tujuan atau hasil yang diinginkan untuk dicapai melalui pelaksanaan program tersebut. Target ini menjadi panduan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program, sesuai dengan informasi yang disampaikan informan (P14) bahwa *"Target utamanya adalah kesejahteraan para pelaku UMKM, lalu membebaskan mereka dari rentenir, dan pastinya usaha mereka bisa berkembang dan dapat merekrut pekerjaan dari sana"*. Target juga bisa untuk membantu menilai apakah tujuan program telah tercapai dengan efektif.

### **Evaluasi Logic Model**

Berdasarkan hasil penelitian agar evaluasi kinerja program pemberdayaan UMKM dapat optimal maka metode evaluasi yang digunakan adalah Logic Model. Evaluasi yang dirancang secara terpadu dengan program yang akan dievaluasinya, yakni program yang memiliki komponen-komponen yang secara sistematis dan logis saling berhubungan, antara komponen program (misal input) dengan komponen program lainnya (misal aktivitas ataupun proses), dan perubahan perilaku yang diharapkan atau hasil program. Dengan demikian, dengan mengenali komponen-komponen program yang akan dievaluasi dan keterkaitan antar

komponen, sehingga diharapkan (i) kecil kemungkinannya terjadi ketidaksesuaian antara input dan output, serta (ii) hasil evaluasi betul-betul dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja program pemberdayaan UMKM yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil evaluasi input dalam program ini diawali dengan Perwako No 7 tahun 2022 tentang tatacara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi. Di dalam Perwako ini dijelaskan bagaimana bentuk kerja sama pemerintah kota di dalam pemberian subsidi melalui BPRS Jam Gadang dan dinas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah nya adalah bidang koperasi dan Usaha Mikro. Pokok pinjaman yang disiapkan BPRS Jam Gadang menjadi modal utama untuk pembiayaan di dalam program tabungan utsman. Anggaran yang tersedia perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan program secara efektif dan efisien. Semakin banyak pokok pinjaman yang bisa BPRS siapkan maka akan semakin banyak pelaku UMKM yang bisa diberikan pembiayaan.

Subsidi APBD untuk pembiayaan margin merupakan input yang penting di program tabungan utsman, karena hal ini yang membuat pelaku UMKM tertarik untuk mengikuti program pemberdayaan UMKM melalui tabungan utsman. Subsidi APBD melihat kondisi pendapatan kota dengan pembayaran margin 19% dari total realisasi anggaran. Hal ini sangat menguntungkan bagi nasabah dan BPRS sebagai pengelola. Dari hasil evaluasi input tersebut maka tahapan input termasuk kategori sangat baik, karena semua komponen yang dibutuhkan dan ketersediaan sumber daya untuk menjalankan program sudah terpenuhi. Kendala yang ditemukan terkait harmonisasi perwako yang cukup lama sehingga launching program terundur beberapa bulan. Didukung dengan penelitian Natasya (2023) pada indikator input evaluasi program keluarga harapan dengan *logic model* peneliti menganalisa sumber-sumber yang diperlukan untuk menjalankan program keluarga harapan seperti staff, relawan, waktu, uang, bahan, teknologi, partner (Garini, 2023).

Evaluasi aktivitas dalam program ini diawali dari aktivitas yang terjadi di pemerintah kota, dimulai dari perancangan perwako, setelah dirancang dinas UKM akan mengusulkan kepada Tim Pengguna Anggaran untuk melihat kondisi APBD kota, setelah diusulkan dan perwako sudah disetujui oleh provinsi maka Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah kota dengan BPRS sebagai pengelola akan dirumuskan. Setelah semua regulasi sudah tercukupi aktivitas selanjutnya launching program, pelaku UMKM yang berminat akan mendaftar langsung ke BPRS Jam Gadang dan memenuhi semua persyaratan yang sudah disiapkan, setelah administrasi sudah memenuhi syarat maka BPRS akan melakukan survey kelayakan ke lokasi usaha pelaku UMKM, jika sesuai kategori maka pembiayaan bisa dilakukan. Sistem dari pengembalian pinjaman dilakukan dengan sistem nasabah menabung dan dijemput oleh petugas BPRS setiap hari, ketika sudah jatuh tempo BPRS akan memotong dari tabungan nasabah untuk mengansur cicilan pinjaman, dan margin yang timbul akan ditanggung oleh pemerintah kota.

Aktivitas pembayaran margin ke BPRS, awal bulan BPRS akan memberikan dokumen penagihan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan standar keuangan pemerintah kota ke Dinas UKM, ketika sudah memenuhi persyaratan dinas UKM akan transfer ke BPRS sejumlah 19% dari total realisasi anggaran yang sudah diberikan BPRS kepada nasabah sebagai pembiayaan. Seiring berjalannya program ini DPS juga ikut andil dalam pengawasan produk maupun kinerja bank, karena BPRS Jam Gadang masih dalam masa transisi dari konvensional ke syariah sehingga DPS memiliki peran penting dalam kepatuhan syariah program ini, karena margin ini merupakan bentuk subsidi dari pemerintah maka DPS juga mengawasi sampai ke bentuk perjanjian kerja sama antara pemerintah kota dengan BPRS.

Dari hasil evaluasi aktivitas tersebut maka tahapan aktivitas termasuk kategori cukup baik, karena masih ada beberapa kendala mulai dari perancangan perwako sampai pengawan program oleh DPS, seperti adanya temuan yang ditemukan oleh DPS bahwa tidak sampai 20% pembuktian retail murabahahnya dan tidak ada waktu pembuktian yang disiplin, ini akan

sangat beresiko terhadap kepatuhan syariahnya dengan memakai akad murabahah karena komoditinya adalah uang yang seharusnya adalah barang dagangan. Sesuai dengan penelitian Natasya (2023) aktivitas yang dilakukan dalam evaluasi program keluarga harapan seperti melakukan pertemuan kelompok, penyaluran bantuan sosial, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, sistem pengaduan masyarakat, pemuthakiran data, sarana dan prasarana penunjang program P2K2 (Garini, 2023)

Evaluasi output dari program ini adanya pengembangan usaha dari pelaku UMKM, yang awalnya hanya berjualan di satu tempat sekarang sudah memiliki cabang seperti yang dilakukan oleh informan P1, dengan berkembangnya usaha maka akan meningkatkan pendapatan dari pelaku usaha sehingga yang tadinya akan berhutang tidak jadi berhutang. Pengembangan usaha ini juga akan membuka lapangan pekerjaan dan akan mengurangi pengangguran. Dampaknya terhadap BPRS selain menambah nasabah juga akan menambahkan income dari margin yang dibayarkan oleh pemerintah kota, karena BPRS merupakan salah satu BUMD di Kota Bukittinggi dengan bertambahnya income dari BPRS maka juga akan meningkatkan pendapatan daerah.

Dari hasil evaluasi output tersebut maka tahapan output termasuk kategori sangat baik, karena banyak pihak yang diuntungkan baik dari sisi nasabah maupun pengelolanya, cuma dengan peminat yang sangat banyak, APBD yang disiapkan untuk program masih terbatas maka belum bisa membiayai seluruh permohonan yang masuk ke BPRS sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa dapat menerima manfaat dari program tabungan utsman ini. Sesuai dengan penelitian Natasya (2023) dalam evaluasi program keluarga harapan pada indikator output peneliti menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan tujuan program dan dampak positif serta negatifnya seperti pendidikan dan kesehatan, program pemberdayaan, kesadaran KPM akan pentingnya kesehatan dan pendidikan, dan pemberian motivasi oleh pendamping PKH (Garini, 2023). Evaluasi outcome untuk program ini masih belum bisa dinilai karena program masih tergolong baru jadi masih butuh waktu untuk bisa melihat dampak jangka panjangnya.

#### 4. Penutup

**Kesimpulan** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kinerja program pemberdayaan UMKM di Kota Bukittinggi melalui tabungan utsman, jika dievaluasi menggunakan metode *logic model*. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program tabunga utsman membantu pelaku UMKM dalam aspek pemodalannya dengan cara bekerja sama dengan BPRS Jam Gadang untuk memberikan pembiayaan berupa pinjaman syariah dengan biaya margin ditanggung pemerintah dari APBD Kota. Program ini mempunyai motivasi untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat, dan menjauhkan masyarakat dari rentenir.

Selama berjalannya program maka evaluasi perlu dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil dari program dalam mencapai tujuannya. Peneliti menggunakan metode *logic model* dalam mengevaluasi program tabungan utsman dengan hasil evaluasi input perancangan Perwako, persiapan pokok pinjaman yang disiapkan BPRS dan subsidi yang disiapkan pemerintah dari APBD Kota dikategorikan sangat baik karena komponen yang dibutuhkan dan ketersediaan sumber daya dan anggaran untuk menjalankan program sudah terpenuhi. Kendala yang ditemukan terkait harmonisasi perwako yang cukup lama..

Hasil evaluasi aktivitas dalam program tabungan utsman dimulai disaat pelaku UMKM yang berminat akan mendaftar langsung ke BPRS Jam Gadang dan memenuhi semua persyaratan yang sudah disiapkan, setelah administrasi sudah memenuhi syarat maka BPRS akan melakukan survey kelayakan ke lokasi usaha pelaku UMKM, jika sesuai kategori maka pembiayaan bisa dilakukan. Sistem dari pengembalian pinjaman dilakukan dengan sistem nasabah menabung dan dijemput oleh petugas BPRS setiap hari, ketika sudah jatuh tempo

BPRS akan memotong dari tabungan nasabah untuk mengansur cicilan pinjaman, dan margin yang timbul akan ditanggung oleh pemerintah kota. Dari hasil evaluasi aktivitas tersebut maka tahapan aktivitas termasuk kategori cukup baik, karena masih ada beberapa kendala mulai dari pengawanan program oleh DPS.

Evaluasi output dari program ini adanya pengembangan usaha dari pelaku UMKM, meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, adanya lapangan pekerjaan dan akan mengurangi pengangguran. Dari hasil evaluasi output tersebut maka tahapan output termasuk kategori sangat baik, karena banyak pihak yang diuntungkan. cuma dengan peminat yang sangat banyak, APBD yang disiapkan untuk program masih terbatas maka belum bisa membiayai seluruh permohonan yang masuk ke BPRS sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa dapat menerima manfaat dari program tabungan utzman ini. Evaluasi outcome untuk program ini masih belum bisa dinilai karena program masih tergolong baru jadi masih butuh waktu untuk bisa melihat dampak jangka panjangnya.

### Implikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kota untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi beberapa hal yang dirasa masih menjadi kendala dari program tabungan utzman. Hal ini dikarenakan menggunakan sistem syariah dalam pembiayaan dan melihat kondisi kemampuan keuangan kota Bukittinggi masih terbatas. Selain itu, diharapkan pula pemerintah kota beserta pengelola untuk lebih teliti dalam hal pengawasan dan pembiayaan.

### Daftar Pustaka

- Agustina, I., & Artiningsih, A. (2017). Evaluasi Implementasi Masterplan Kawasan Agropolitan Ciwidey Menggunakan Logic Models. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.14710/jwl.5.1.1-10>
- Alamsyah, I. E. (2023). *BPR Syariah Jam Gadang Bukittinggi Raih Laba Rp 1,4 Miliar pada 2022*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rp3qn1349/bpr-syariah-jam-gadang-bukittinggi-raih-laba-rp-14-miliar-pada-2022>
- Anggleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Journal PPS UNISTI*, 1(1), 24–39. <https://doi.org/10.48093/jiask.v1i1.3>
- Anggraeni Charismanur Wilfarda, Wulan Puspita Ningtiyas, N. M. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 47–65.
- Ardiansyah, T. (2019). Model Financial Dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158–166. <https://doi.org/10.31334/bijak.v16i2.518>
- Astari, A. (2017). *Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi*. 3(1), 1–14.
- Badar, N. A. (2023). *740 UMKM manfaatkan Rp 6,8 miliar Tabungan Utsman Bukittinggi*. 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3429393/740-umkm-manfaatkan-rp-68-miliar-tabungan-utsman-bukittinggi>
- Covid-, U. D. I. E. R. A., Kasus, S., Di, B., & Jambi, P. (2021). *UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI Halaman 155 dari 180*. 9(2), 155–168.
- Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. *Journal Ekspor*, 11(3), 296–300.
- duraisy Rosyidi, B. (2022). *Evaluasi Program*. <https://bahurrosyididuraisy.wordpress.com/research/evaluasi/#:~:text=Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program,keputusan>

- berikutnya. Evaluasi sama artinya dengan kegiatan supervisi. Ensiklopedia, W. (2023). *Kota Bukittinggi*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bukittinggi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi)
- Forijati, R. (2014). Analisis Model Evaluasi Pemberdayaan UMKM Di Kediri. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Garini, N. A., Ramadhan, S. H., Aliyyah, I. N., Ramadhan, S., Rafinda, I., & Sukmawati, E. (2023). Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. *Responsive*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.24198/responsive.v6i1.42757>
- Hajaroh, M. (2019). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Hammarberg, K., Kirkman, M., & De Lacey, S. (2016). Qualitative research methods: When to use them and how to judge them. *Human Reproduction*, 31(3), 498–501. <https://doi.org/10.1093/humrep/dev334>
- Ikhsanto, jurusan teknik mesin L. N. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Sidoarjo*. 21(1), 1–9.
- Indriayu, M. (2020). *Mewujudkan UMKM Berdaya*. CV.Indotama Solo. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=askfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA31&dq=permasalahan+umum+UMKM+di+Indonesia&ots=hPrfnKXaGI&sig=g8jUbwzxfFvPUSwlzT5tXrVzms&redir\\_esc=y#v=onepage&q=permasalahan umum UMKM di Indonesia&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=askfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA31&dq=permasalahan+umum+UMKM+di+Indonesia&ots=hPrfnKXaGI&sig=g8jUbwzxfFvPUSwlzT5tXrVzms&redir_esc=y#v=onepage&q=permasalahan%20umum%20UMKM%20di%20Indonesia&f=false)
- Kågström, B. O., Ling, P., & Van Loan, C. (1998). GEMM-Based Level 3 BLAS: High-Performance Model Implementations and Performance Evaluation Benchmark. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 24(3), 268–302. <https://doi.org/10.1145/292395.292412>
- Kartowagiran, B. (2013). *Optimalisasi Evaluasi Pembelajaran Teknik Mesin Melalui Logic Model Untuk Meningkatkan Soft Skills Lulusan* (pp. 1–43).
- Kekahio, W., Cicchinelli, L., Lawton, B., & Brandon, P. (2014). Logic Models : A Tool for Effective Program Planning , Collaboration , and Monitoring. *Regional Educational Laboratory Pacific ERIC, EBSCOhost*, 1–4. [http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED544779%0Ahttps://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/pacific/pdf/REL\\_2014025.pdf](http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED544779%0Ahttps://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/pacific/pdf/REL_2014025.pdf)
- Kholid, I., Rahayu, S. M., & Yaningwati, F. (2014). Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.Kukm/Xii/2009. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol*, 15(2), 1–6.
- Kondisi, P., Covid, P., & Indonesia, D. I. (2020). *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6*. 6(2), 139–146.
- Kurniawan, S., Wijaya, A. F., & Domai, T. (2014). *Evaluasi Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan ( Studi Program Anti Kemiskinan Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban )*. 17(2), 117–125.
- P.Hatry, H. (2006). *performance measurement*. Urban Institute Press. [https://www.google.co.id/books/edition/Performance\\_Measurement/PQNUNlwdbDQC?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Performance_Measurement/PQNUNlwdbDQC?hl=en&gbpv=0)
- Peraturan.bpk.go.id. (2018). Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.
- Pratiwi, F. (2023). *Bukittinggi Realisasikan Lagi Pembiayaan Tabungan Utsman*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/roxfom457/bukittinggi-realisasikan-lagi-pembiayaan-tabungan-utsman>
- Rahmah, I., Kaukab, M. E., Yuwono, W., Pascasarjana, F., Yogyakarta, U. M., & Artikel, R. (2020). *Kata Kunci: 2*, 30–50.

- Rohmatulloh, M. I. S. (2014). Pengembangan Model Logika Evaluasi Program Pengembangan SDM Responsif Gender Bidang ESDM. *Jurnal Teknik Industri*, 15(2), 145–153.
- Rush, B. (1991). *Program logic models: expanding their role and structure for program planning and evaluation*. 6(2).
- Saleh, A., & Handhoyo, R. N. (2018). Implementasi Pembinaan Program Forum Komunikasi Umkm Terhadap Kinerja Pelaku Umkm Di Kelurahan Bantarjati, Kota Bogor. *Jurnal KMP (Jurnal Komunikasi Pembangunan)*, 15(2), 67–79.
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Simatupang, T. (2008). Industri Kreatif Jawa Barat. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.
- Srijani, K. N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>
- Subali Patma, T., Malang, P. N., Muslim, S., Negeri, P., & Fauziah, M. (2021). Pemberdayaan Umkm Melalui Legalitas Usaha. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021*, 1(1), 246–249. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe2021/article/view/4403>
- Sufiani, Z. (2022). Definisi, Kriteria dan Konsep UMKM. *Osfpreprints*, 90500120021, 1–13.
- Tika, R. M. (2015). Pengaruh car, ldr, npl, tingkat inflasi, dan kebijakan perubahan aturan definisi umkm terhadap share penyaluran kredit umkm oleh perbankan di Indonesia. *Skripsi*, 1–11.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1*.
- Untari, D., Fajariana, D. E., & Ridwan, M. (2019). Preparing the Asean Economic Community (Mea) With the Development Strategy of Small and Medium Enterprises (Umkm) To Get Business Credit in Kelurahan Cibaduyut Bandung. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 3(03), 215–224. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v3i03.587>
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008, 1*, 1–31.
- Yursil. (2022). *Anggaran Tabungan Utsman Rp 9,3 M Lebih*. <https://www.hantaran.co/anggaran-tabungan-utsman-rp-93-m-lebih/>